

## Penguatan Pendidikan Nonformal Berbasis Asesmen Kebutuhan bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Muhammad Nur Alamsyah<sup>1</sup>, Yolandika Arsyad<sup>2\*</sup>

<sup>1)2)</sup> Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar

[muhammad.nur.alamsyah@unm.ac.id](mailto:muhammad.nur.alamsyah@unm.ac.id)<sup>1</sup>, [yolandika.arsyad@unm.ac.id](mailto:yolandika.arsyad@unm.ac.id)<sup>2</sup>

(\*Corresponding Author)

### Riwayat artikel:

Dikirim : 17-05-2026

Direvisi : 23-05-2026

Diterima : 27-05-2026

### Kata kunci:

Asesmen Kebutuhan Belajar, Lembaga Pemasyarakatan, Pelatihan Keterampilan, Pendidikan Nonformal.

### Keywords:

Learning Needs Assessment, Correctional Institution, Skill Training, Nonformal Education.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belajar warga binaan pada program pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sebagai dasar pengembangan pendidikan nonformal yang relevan dan berbasis kebutuhan peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yang terdiri atas pengelola PKBM Kader Bangsa dan sepuluh warga binaan program kesetaraan. Data dikumpulkan melalui kartu Sistem Kegiatan Belajar Masyarakat (SKBM), wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan dukungan tabulasi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menjahit menjadi kebutuhan belajar utama warga binaan, diikuti keterampilan berwirausaha dan perbengkelan. Sementara itu, pengelola program memprioritaskan keterampilan servis telepon genggam, tata rias, menjahit, sablon, dan tata boga berdasarkan pertimbangan sumber daya serta pelaksanaan program di lingkungan lapas. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara kebutuhan belajar warga binaan (*felt needs*) dan kebutuhan yang dipersepsikan pengelola program (*perceived needs*), meskipun kedua pihak sama-sama menempatkan keterampilan menjahit sebagai prioritas pembelajaran. Penelitian ini menegaskan bahwa asesmen kebutuhan belajar penting dalam pengembangan pendidikan nonformal yang partisipatif, kontekstual, serta mendukung pemberdayaan dan reintegrasi sosial warga binaan.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the learning needs of inmates participating in the equivalency education program at Class I Makassar Correctional Institution as a basis for developing relevant and needs-based nonformal education programs. The study employed a qualitative descriptive approach involving the managers of PKBM Kader Bangsa and ten inmates enrolled in the equivalency education program as research participants. Data were collected through *Sistem Kegiatan Belajar Masyarakat* (SKBM) cards, semi-structured interviews, observations, and documentation, and were analyzed using qualitative descriptive techniques supported by simple tabulation. The findings revealed that sewing skills were identified as the primary learning need among inmates, followed by entrepreneurship and technical repair skills. Meanwhile, program managers prioritized mobile phone repair, beauty care, sewing, screen printing, and culinary skills based on resource availability and program implementation considerations within the correctional institution. The study also found differences between inmates' learning needs (*felt needs*) and the needs perceived by program managers (*perceived needs*), although both groups identified sewing skills as a learning priority. This study highlights the importance of learning needs assessment in developing participatory and contextual nonformal education programs that support inmate empowerment and social reintegration.



Open access under CC-BY-SA

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun status hukum individu. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan berpikir, keterampilan hidup, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara produktif di masyarakat. Freire (1970) menekankan bahwa pendidikan harus menjadi proses pembebasan yang berangkat dari realitas sosial peserta didik sehingga mampu meningkatkan kesadaran kritis dan kemandirian individu. Pandangan tersebut juga relevan dengan konsep pendidikan masyarakat yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen transformasi sosial dan pemberdayaan kelompok marginal (Tilaar, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari proses pembinaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan warga binaan melalui pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif. Oleh karena itu warga binaan pemasyarakatan, tetap memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan (Warner & Anne, 2014). Pendidikan bagi warga binaan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga diarahkan pada proses rehabilitasi sosial dan penguatan kapasitas individu agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah menyelesaikan masa pidana (Davis, et al., 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan melalui proses pembinaan yang terencana dan berkesinambungan. Salah satu bentuk pembinaan tersebut diwujudkan melalui program pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Pendidikan nonformal tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan literasi, tetapi juga sebagai media pengembangan kecakapan hidup dan keterampilan produktif yang dapat mendukung kemandirian ekonomi warga binaan setelah bebas. Program pendidikan kesetaraan menjadi salah satu layanan pendidikan nonformal yang banyak dikembangkan di lembaga pemasyarakatan karena memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk melanjutkan pendidikan sekaligus memperoleh keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan hidup mereka. UNESCO (2022) menjelaskan bahwa pendidikan di lembaga pemasyarakatan memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan kepercayaan diri, kemampuan sosial, dan kesiapan kerja warga binaan. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Davis, et al. (2014) yang menunjukkan bahwa partisipasi warga binaan dalam program pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat mendukung kesiapan sosial dan ekonomi warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Selain itu, pendidikan berbasis keterampilan juga dinilai lebih relevan karena mampu memberikan bekal ekonomi yang mendukung keberlangsungan hidup warga binaan pasca pembebasan (Fathoni, 2025). Namun demikian, efektivitas program pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian program pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kondisi warga binaan sebagai peserta didik (Rahmat, 2018). Pelatihan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan keterampilan dan kemandirian warga binaan jika didasarkan pada kesenjangan kompetensi riil peserta. Program yang bersifat *top-down* sering kali gagal memberikan dampak optimal karena tidak relevan dengan masalah nyata yang dihadapi peserta (Nasrullah, Muchran, & Aderiantika, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya program pembelajaran, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata warga binaan. Penguatan pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan warga binaan. Dalam konteks program pendidikan kesetaraan, warga binaan memiliki latar belakang

pendidikan, pengalaman hidup, dan orientasi masa depan yang berbeda sehingga membutuhkan program pembelajaran dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di lembaga masyarakat adalah masih terbatasnya penerapan asesmen kebutuhan dalam proses perencanaan program pembelajaran. Sebagian program pelatihan keterampilan di lembaga masyarakat masih disusun secara *top-down* berdasarkan kebijakan lembaga atau ketersediaan sarana, bukan berdasarkan kebutuhan riil warga binaan sebagai peserta didik. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa program pembelajaran kurang mampu menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana. Dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan, ketidaksesuaian antara program pembelajaran dengan kebutuhan warga binaan dapat menyebabkan rendahnya partisipasi belajar dan kurang optimalnya penguasaan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Padahal, program pendidikan kesetaraan di lembaga masyarakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi hak pendidikan warga binaan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan keterampilan hidup yang dapat menunjang kemandirian mereka. Hal ini menegaskan bahwa kebutuhan belajar merupakan komponen penting dalam penyusunan program pendidikan yang partisipatif, kontekstual, dan tepat sasaran. Tanpa penerapan asesmen kebutuhan yang baik, proses perencanaan program pembelajaran kehilangan arah dan gagal menjawab kebutuhan riil warga binaan (Lubis & Warih, 2025). Kaufman, Rojas, & Mayer (1993) menjelaskan bahwa asesmen kebutuhan merupakan proses identifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan sebagai dasar dalam merancang program yang lebih efektif. Asesmen kebutuhan belajar tidak hanya berfungsi sebagai proses identifikasi masalah, tetapi juga sebagai strategi untuk memahami minat, potensi, hambatan, dan aspirasi warga binaan terkait jenis keterampilan yang mereka butuhkan (Buana, Toni, & Agustian, 2025). Pendekatan berbasis kebutuhan menjadi penting karena warga binaan memiliki latar belakang sosial, pengalaman pendidikan, dan orientasi masa depan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pengembangan program pendidikan nonformal di lembaga masyarakat perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata warga binaan agar program yang dilaksanakan lebih relevan dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi warga binaan di lembaga masyarakat. Penelitian Wahyuni, Fahira, & Sariyanti (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran kesetaraan Paket C bagi warga binaan di lembaga masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan akses pendidikan bagi warga belajar yang terputus dari pendidikan formal. Akan tetapi, penelitian tersebut masih berfokus pada proses pelaksanaan program pembelajaran sehingga belum menunjukkan bagaimana kebutuhan belajar warga binaan dijadikan dasar dalam penyusunan program pendidikan. Sementara itu, penelitian Widyaningtyas & Subroto (2023) lebih menekankan aspek yuridis dalam implementasi pendidikan kesetaraan bagi warga binaan, khususnya terkait pemenuhan hak pendidikan dan hambatan pelaksanaan program. Kajian tersebut penting dalam melihat posisi pendidikan sebagai hak warga binaan, namun belum mengkaji relevansi program pembelajaran dengan kebutuhan riil peserta didik. Selain itu, Hizbullah & Karisadini (2025) menemukan bahwa kolaborasi antara PKBM dan lembaga masyarakat mampu memperluas akses pendidikan nonformal bagi anak binaan, tetapi fokus penelitian masih terletak pada aspek kelembagaan dan kendala administratif dalam penyelenggaraan program. Dalam konteks internasional, Behan (2014) menegaskan bahwa program pendidikan di lembaga masyarakat harus berlandaskan prinsip pedagogi dan integritas profesional agar tidak terjebak dalam sistem korektif lembaga. Studi Tonseth & Bergsland (2019) menyatakan bahwa pendidikan nonformal di lembaga masyarakat berkontribusi terhadap

penguatan kapasitas personal dan sosial warga binaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan kapasitas dan kesiapan sosial warga binaan. Meskipun penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan nonformal dalam mendukung rehabilitasi dan pengembangan kapasitas warga binaan, sebagian besar kajian masih berfokus pada efektivitas program, pemenuhan hak pendidikan, atau aspek kelembagaan program pembelajaran. Kajian yang secara khusus menempatkan asesmen kebutuhan belajar sebagai landasan utama dalam pengembangan pendidikan nonformal bagi warga binaan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji perbedaan perspektif antara kebutuhan yang dirasakan warga binaan (*felt needs*) dan kebutuhan yang dipersepsikan pengelola program (*perceived needs*) dalam proses penyusunan program pendidikan. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang lebih kontekstual mengenai pengembangan pendidikan nonformal berbasis asesmen kebutuhan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan melalui kerja sama dengan PKBM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belajar warga binaan sebagai dasar penguatan pendidikan nonformal di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi jenis keterampilan yang dibutuhkan warga binaan, memahami kesesuaian antara kebutuhan warga binaan dengan perspektif pengelola program, serta menganalisis pentingnya asesmen kebutuhan dalam pengembangan program pendidikan nonformal yang relevan dan tepat sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pendidikan masyarakat berbasis kebutuhan, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pengelola program pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa pendidikan nonformal bagi warga binaan harus diarahkan pada pengembangan kapasitas hidup, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan terhadap proses reintegrasi sosial secara berkelanjutan. Penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis perbedaan antara *felt needs* warga binaan dan *perceived needs* pengelola program dalam pengembangan pendidikan nonformal berbasis asesmen kebutuhan di lembaga pemasyarakatan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kebutuhan belajar warga binaan dalam program pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis kebutuhan belajar berdasarkan pengalaman, minat, dan kondisi sosial warga binaan sebagai peserta didik (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan subjek penelitian terdiri atas pengelola program pendidikan kesetaraan dan warga binaan yang mengikuti program pembelajaran. Penelitian dilaksanakan kurang lebih satu bulan mulai tanggal 12 April hingga 7 Mei 2025. Subjek penelitian terdiri atas satu orang pengelola PKBM Kader Bangsa dan sepuluh warga binaan program pendidikan kesetaraan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Patton, 2015). Adapun kriteria subjek penelitian meliputi: (1) warga binaan yang aktif mengikuti program pendidikan kesetaraan, (2) warga binaan yang bersedia memberikan informasi terkait kebutuhan belajar dan keterampilan yang dibutuhkan, serta (3) pengelola program yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, dan penggunaan kartu Sistem Kegiatan Belajar Masyarakat (SKBM). Wawancara

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan belajar, minat keterampilan, dan pengalaman pembelajaran warga binaan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi pembelajaran dan sarana pendidikan di lingkungan lembaga masyarakat, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian. Kartu SKBM digunakan untuk memetakan kebutuhan dan prioritas keterampilan warga binaan sebagai dasar penyusunan program pembelajaran berbasis kebutuhan (Kaufman, Rojas, & Ayer, 1993).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan kartu SKBM dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk naratif sederhana untuk menunjukkan prioritas kebutuhan belajar warga binaan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari warga binaan, pengelola program, hasil observasi, dan dokumen pendukung penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Gambaran Pelaksanaan Asesmen Kebutuhan Belajar

Pelaksanaan asesmen kebutuhan belajar di Lembaga Masyarakat Kelas I Makassar dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan pengisian kartu SKBM. Asesmen melibatkan dua kelompok informan, yaitu pengelola program PKBM Kader Bangsa dan sepuluh warga binaan yang mengikuti program pendidikan kesetaraan. Tahap awal asesmen difokuskan pada pihak pengelola program untuk memperoleh gambaran mengenai jenis keterampilan yang dinilai relevan dengan kebutuhan warga binaan dan memungkinkan untuk dilaksanakan di lingkungan lembaga masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kartu SKBM, pengelola program mengidentifikasi beberapa keterampilan yang dipandang penting untuk dikembangkan, yaitu servis telepon genggam, tata rias kecantikan, menjahit, sablon, dan tata boga.

**Tabel 1.** Kebutuhan Keterampilan Menurut Pengelola Program PKBM

No.	Jenis Keterampilan pada Program PKBM
1	Servis telepon genggam (HP)
2	Tata rias kecantikan
3	Menjahit
4	Sablon
5	Tata boga

Sumber: Hasil wawancara dan asesmen pengelola PKBM Kader Bangsa, 2025.

Pengelola program menyampaikan bahwa keterampilan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kondisi pembelajaran dan fasilitas yang tersedia di lingkungan lembaga masyarakat.

*“Kami memilih keterampilan yang memungkinkan untuk dilaksanakan di dalam lapas dan bisa dipelajari warga binaan secara bertahap, seperti menjahit dan tata boga.”*

(Wawancara Pengelola PKBM, 2025).

Pengelola PKBM Kader Bangsa menawarkan beberapa keterampilan tersebut karena dinilai memiliki nilai praktis serta dapat disesuaikan dengan kondisi pembelajaran, ketersediaan sarana, dan keberlanjutan program di Lembaga Masyarakat Kelas I Makassar. Selain pengelola program, asesmen juga dilakukan kepada warga binaan program pendidikan kesetaraan. Hasil pengisian kartu

SKBM menunjukkan bahwa warga binaan memilih beberapa jenis keterampilan, yaitu menjahit, berwirausaha, bengkel, komputer, mebel, dan sablon. Pilihan keterampilan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan belajar yang beragam sesuai dengan minat dan pengalaman masing-masing warga binaan.

## 2. Prioritas Kebutuhan Belajar Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Hasil tabulasi data kebutuhan belajar menunjukkan bahwa keterampilan menjahit menjadi kebutuhan belajar dengan jumlah peminat tertinggi.

**Tabel 2.** Prioritas Kebutuhan Belajar Warga Binaan

No.	Jenis Keterampilan pada Program PKBM	Jumlah Peminat
1	Menjahit	4
2	Wirausaha	3
3	Bengkel	2
4	Komputer	1
5	Sablon	1
6	Mebel	1

Sumber: Hasil asesmen kebutuhan belajar warga binaan LAPAS Kelas I Makassar, 2025.

Berdasarkan Tabel 2, keterampilan menjahit menjadi kebutuhan belajar dengan jumlah peminat tertinggi. Jumlah pilihan keterampilan tidak menunjukkan jumlah informan secara tunggal karena setiap warga binaan diperbolehkan memilih lebih dari satu jenis keterampilan sesuai dengan minat dan kebutuhan belajarnya. Dari sepuluh warga binaan yang menjadi informan, empat orang memilih keterampilan menjahit sebagai prioritas utama atau tambahan kebutuhan belajar. Selanjutnya, keterampilan berwirausaha menjadi prioritas kedua dengan jumlah peminat sebanyak tiga orang, sedangkan keterampilan bengkel menempati urutan ketiga dengan dua orang peminat. Selain itu, beberapa warga binaan juga memilih keterampilan komputer, sablon, dan mebel sebagai kebutuhan belajar tambahan.

*“Kalau saya lebih memilih belajar menjahit karena nanti setelah keluar bisa dipakai untuk cari penghasilan sendiri.”*

(Wawancara Warga Binaan, 2025).

Sementara itu, keterampilan berwirausaha dipilih karena warga binaan memandang pentingnya kemampuan mengelola usaha sebagai bekal untuk memperoleh penghasilan secara mandiri setelah bebas. Adapun keterampilan bengkel dipilih karena dianggap memiliki prospek kerja yang dapat langsung diterapkan di masyarakat. Pilihan keterampilan yang muncul dalam asesmen ini menunjukkan bahwa warga binaan lebih banyak memilih keterampilan yang dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu, PKBM Kader Bangsa menyediakan tutor dan media pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan kesetaraan.

## 3. Kondisi Pembelajaran dan Sumber Belajar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Hasil observasi menunjukkan bahwa program pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar telah memiliki beberapa fasilitas pendukung pembelajaran, seperti ruang belajar, papan tulis, proyektor, buku pelajaran, media digital, dan akses terhadap sumber belajar tertentu. Kegiatan pembelajaran juga memanfaatkan masjid sebagai ruang belajar warga binaan. Selain itu, PKBM Kader Bangsa menyediakan tutor dan media pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan kesetaraan. Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas

pembelajaran masih terbatas, terutama pada sarana praktik keterampilan dan ruang pelatihan khusus. Kondisi tersebut terlihat pada penggunaan ruang belajar bersama untuk beberapa kegiatan pembelajaran dan keterampilan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa warga binaan cukup aktif mengikuti kegiatan pembelajaran program kesetaraan, termasuk dalam proses wawancara, pengisian kartu SKBM, dan kegiatan pembelajaran selama penelitian. Dukungan dari pihak PKBM Kader Bangsa juga menjadi faktor penting dalam keberlangsungan program pendidikan nonformal di lapas. PKBM tidak hanya berperan sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran dan fasilitator kegiatan keterampilan warga binaan. Keberadaan sumber belajar, media pembelajaran, dan tutor memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran yang berlangsung.

#### 4. Perbedaan Perspektif Kebutuhan Belajar antara Warga Binaan dan Pengelola Program

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara kebutuhan belajar yang dirasakan warga binaan (*felt needs*) dan kebutuhan yang dipersepsikan pengelola program (*perceived needs*). Warga binaan lebih memprioritaskan keterampilan yang dianggap mampu menunjang kemandirian ekonomi, seperti menjahit, berwirausaha, dan bengkel. Sementara itu, pihak pengelola program lebih mempertimbangkan jenis keterampilan yang mudah dilaksanakan berdasarkan kondisi lingkungan lembaga pasyarakatan dan ketersediaan sumber daya pembelajaran.

Salah satu warga binaan menyampaikan:

*“Yang penting bagi kami keterampilan yang nanti bisa dipakai kerja atau usaha setelah keluar dari lapas.”*

(Wawancara Warga Binaan, 2025).

Di sisi lain, pengelola program menjelaskan:

*“Kami juga mempertimbangkan fasilitas, keamanan, dan tenaga pendamping sebelum menentukan jenis pelatihan yang bisa dijalankan.”*

(Wawancara Pengelola PKBM, 2025).

Meskipun terdapat perbedaan perspektif, keterampilan menjahit menjadi kebutuhan yang sama-sama dipandang penting oleh warga binaan dan pengelola program. Selain itu, pengelola program juga memprioritaskan keterampilan tata boga, tata rias, dan servis telepon genggam, sedangkan

### Pembahasan

#### 1. Asesmen Kebutuhan sebagai Dasar Penguatan Pendidikan Nonformal

Asesmen kebutuhan belajar menjadi langkah penting dalam pengembangan pendidikan nonformal di lembaga pasyarakatan karena memungkinkan program pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan nyata warga binaan. Dalam konteks pendidikan masyarakat, kebutuhan belajar tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga mencakup kebutuhan keterampilan hidup yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi peserta didik. Tingginya minat warga binaan terhadap keterampilan menjahit, berwirausaha, dan bengkel menunjukkan bahwa warga binaan lebih membutuhkan program pembelajaran yang memiliki manfaat praktis bagi kehidupan mereka setelah bebas dari lembaga pasyarakatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa program pendidikan kesetaraan perlu dikembangkan secara kontekstual dan berbasis kebutuhan peserta didik agar pembelajaran tidak hanya bersifat administratif. Pendekatan tersebut sejalan dengan pemikiran Freire (1970) yang menekankan bahwa pendidikan harus berangkat dari realitas sosial peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membebaskan. Pendidikan juga memiliki potensi

transformatif karena dapat membantu peserta didik membangun cara pandang baru terhadap kehidupan mereka sehingga mendorong perubahan sosial dan pengembangan diri (Arsyad, Asri, & Febriansa, 2025). Oleh karena itu, asesmen kebutuhan tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi program, tetapi juga menjadi strategi dalam memperkuat relevansi pendidikan nonformal bagi warga binaan.

Pendekatan berbasis kebutuhan juga memperlihatkan bahwa pendidikan nonformal di lembaga masyarakat memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar pemenuhan hak pendidikan. Program pembelajaran yang dirancang berdasarkan kebutuhan peserta didik cenderung lebih diminati karena dianggap mampu memberikan manfaat langsung dalam kehidupan mereka. Hal tersebut terlihat dari kecenderungan warga binaan memilih keterampilan yang dapat dikembangkan secara mandiri dan memiliki peluang ekonomi di masyarakat. Dalam perspektif pendidikan orang dewasa, partisipasi peserta didik dalam proses identifikasi kebutuhan belajar merupakan unsur penting dalam menciptakan pembelajaran yang demokratis dan relevan dengan pengalaman hidup peserta didik (Knowles, Holton, & Swanson, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa warga binaan tidak dapat diposisikan hanya sebagai objek pembinaan, tetapi juga sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kebutuhan dan aspirasi tertentu. Penelitian Wahyuni, Fahira, & Sariyanti (2023) menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan kesetaraan di lembaga masyarakat akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik warga belajar. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Widyaningtyas & Subroto (2023) bahwa keterbatasan fasilitas dan kondisi pembelajaran di lembaga masyarakat memerlukan penyusunan program yang lebih kontekstual dan adaptif. Asesmen kebutuhan belajar menjadi dasar penting dalam memperkuat fungsi pendidikan nonformal sebagai sarana pemberdayaan warga binaan melalui program pembelajaran yang lebih relevan dan tepat sasaran.

## **2. *Felt Needs* dan *Perceived Needs* dalam Program Pendidikan Kesetaraan**

Kajian mengenai kebutuhan belajar memandang *felt needs* sebagai kebutuhan yang dirasakan langsung oleh peserta didik berdasarkan pengalaman dan kondisi hidupnya, sedangkan *perceived needs* merupakan kebutuhan yang dipandang penting oleh pihak lain atau penyelenggara program (Bradshaw, 1972). Perbedaan antara *felt needs* dan *perceived needs* memperlihatkan bahwa kebutuhan belajar warga binaan tidak selalu sejalan dengan prioritas pengelola program pendidikan. Warga binaan cenderung memilih keterampilan yang dianggap dapat menunjang kemandirian ekonomi, seperti menjahit, bengkel, dan berwirausaha, sedangkan pengelola program lebih mempertimbangkan aspek teknis pelaksanaan pembelajaran, seperti ketersediaan fasilitas, keamanan, dan sumber daya pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyusunan program pendidikan nonformal di lembaga masyarakat dipengaruhi oleh dua kepentingan yang berbeda, yaitu kebutuhan peserta didik dan kesiapan institusi dalam menyediakan layanan pembelajaran. Dalam penelitian ini, warga binaan lebih memprioritaskan keterampilan yang memiliki manfaat ekonomi dan dapat dijalankan secara mandiri setelah bebas dari lembaga masyarakat. Sebaliknya, pengelola program cenderung memilih keterampilan yang realistis untuk dilaksanakan berdasarkan kondisi sarana dan lingkungan pembelajaran yang tersedia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa program pendidikan nonformal tidak dapat dirancang hanya berdasarkan pendekatan institusional semata. Keterlibatan warga binaan dalam proses identifikasi kebutuhan belajar menjadi penting agar program pendidikan yang dikembangkan lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Keberadaan perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belajar warga binaan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh pengalaman hidup serta orientasi masa depan mereka. Pilihan warga binaan terhadap keterampilan yang bersifat aplikatif menunjukkan adanya orientasi

pembelajaran yang berkaitan erat dengan kesiapan ekonomi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks pendidikan nonformal, kebutuhan belajar peserta didik menjadi dasar penting dalam menciptakan pembelajaran yang partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Tonseth & Bergsland (2019) yang menjelaskan bahwa pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan berkontribusi terhadap penguatan kapasitas personal dan kesiapan sosial warga binaan. Selain itu, program pendidikan berbasis keterampilan akan lebih efektif apabila disusun sesuai kebutuhan peserta didik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pendidikan kesetaraan di lembaga pemasyarakatan perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi warga binaan untuk menyampaikan kebutuhan dan minat belajarnya. Dengan adanya keterlibatan peserta didik dalam proses asesmen kebutuhan, program pembelajaran dapat dirancang secara lebih partisipatif dan sesuai dengan kondisi warga binaan. Pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pendidikan nonformal tidak hanya berfungsi sebagai proses pembinaan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan kapasitas hidup warga binaan secara berkelanjutan hingga mereka kembali ke tengah masyarakat.

### **3. Pelatihan Keterampilan dan Pemberdayaan Warga Binaan**

Pelatihan keterampilan dalam program pendidikan kesetaraan memiliki hubungan yang erat dengan proses pemberdayaan warga binaan. Tingginya minat warga binaan terhadap keterampilan menjahit, berwirausaha, dan bengkel menunjukkan bahwa keterampilan produktif dipandang sebagai bekal penting untuk menunjang kehidupan ekonomi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Keterampilan menjahit menjadi pilihan dominan karena dianggap dapat dilakukan secara mandiri dengan modal yang relatif terjangkau dan memiliki peluang usaha yang cukup luas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa warga binaan memandang pelatihan keterampilan bukan hanya sebagai aktivitas pembelajaran, tetapi juga sebagai upaya untuk mempersiapkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka di masa depan. Dalam perspektif pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan merupakan bagian dari pengembangan kecakapan hidup (*life skills*) yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari (Sudjana, 2004). Pendidikan nonformal tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga diarahkan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan di lembaga pemasyarakatan memiliki posisi strategis sebagai sarana pengembangan kapasitas hidup warga binaan. Integrasi antara pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan juga menunjukkan bahwa pendidikan nonformal dapat menjadi media pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi warga binaan.

Pelatihan keterampilan juga memiliki kontribusi terhadap penguatan rasa percaya diri dan kesiapan sosial warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana. Penguasaan keterampilan tertentu dapat membantu warga binaan membangun keyakinan bahwa mereka tetap memiliki kemampuan untuk bekerja dan berpartisipasi secara produktif di masyarakat. Dalam konteks pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan keterampilan tidak hanya dimaknai sebagai proses pembinaan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari rehabilitasi sosial warga binaan. Sejalan dengan hal ini, Behan (2014) menjelaskan bahwa pendidikan di lembaga pemasyarakatan harus diarahkan pada pengembangan kapasitas manusia dan pemberdayaan individu. Pelibatan warga binaan dalam program pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat mendukung kesiapan sosial dan ekonomi mereka setelah kembali ke masyarakat (Davis, et al., 2014). Selain itu, pentingnya kolaborasi antara PKBM dan lembaga pemasyarakatan dapat memperluas akses pendidikan nonformal sekaligus mendukung pengembangan keterampilan warga binaan. Dalam konteks penelitian ini, keterampilan produktif yang dipilih warga binaan menunjukkan adanya kebutuhan terhadap program pembelajaran yang dapat

---

memberikan manfaat nyata dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pengembangan program pelatihan keterampilan di lembaga pemasyarakatan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, dukungan sarana pembelajaran, dan peluang pengembangan keterampilan di masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa asesmen kebutuhan belajar memiliki peran penting sebagai dasar penguatan pendidikan nonformal bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Kebutuhan belajar warga binaan dalam program pendidikan kesetaraan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan, tetapi juga diarahkan pada pengembangan keterampilan yang dapat mendukung kemandirian ekonomi setelah menyelesaikan masa pidana. Keterampilan menjahit menjadi kebutuhan belajar utama warga binaan, diikuti keterampilan berwirausaha dan bengkel, yang menunjukkan bahwa warga binaan lebih memprioritaskan keterampilan yang bersifat praktis, aplikatif, dan memiliki peluang usaha di masyarakat. Di sisi lain, pengelola program lebih mempertimbangkan aspek teknis pelaksanaan pembelajaran, seperti ketersediaan fasilitas, sumber daya pembelajaran, dan kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan. Perbedaan antara *felt needs* dan *perceived needs* tersebut memperlihatkan pentingnya pelibatan warga binaan dalam proses identifikasi kebutuhan belajar agar program pendidikan yang disusun lebih relevan dan tepat sasaran.

Esensi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari proses pembinaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial melalui pengembangan keterampilan hidup yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan. Pendekatan berbasis asesmen kebutuhan memungkinkan program pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan dikembangkan secara lebih partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan kapasitas hidup warga binaan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan masyarakat, khususnya terkait pentingnya asesmen kebutuhan dalam penyusunan program pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pengelola program pendidikan nonformal agar pengembangan program pembelajaran dan pelatihan keterampilan lebih memperhatikan kebutuhan nyata warga binaan sebagai peserta didik.

### **Saran**

Pengembangan pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan perlu dilakukan melalui pendekatan berbasis asesmen kebutuhan agar program pembelajaran dan pelatihan keterampilan lebih relevan dengan kebutuhan warga binaan. Pengelola program pendidikan kesetaraan diharapkan dapat melibatkan warga binaan secara lebih partisipatif dalam proses identifikasi kebutuhan belajar sehingga program yang disusun tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga kebutuhan nyata peserta didik. Selain itu, dukungan sarana pembelajaran, fasilitas pelatihan keterampilan, serta kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan penyelenggara pendidikan nonformal perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program pembelajaran dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Pengembangan pelatihan keterampilan produktif seperti menjahit, berwirausaha, dan bengkel juga perlu diperkuat karena dinilai memiliki potensi dalam mendukung kemandirian ekonomi warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai implementasi pendidikan nonformal berbasis kebutuhan di berbagai lembaga pemasyarakatan dengan

jumlah subjek penelitian yang lebih beragam. Selain itu, penelitian mendatang juga perlu mengkaji efektivitas pelaksanaan program pelatihan keterampilan terhadap kesiapan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan proses reintegrasi sosial warga binaan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut agar kajian mengenai pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada identifikasi kebutuhan belajar, tetapi juga pada dampak jangka panjang program pendidikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga binaan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang telah memberikan izin dan dukungan selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengelola PKBM Kader Bangsa serta seluruh warga binaan program pendidikan kesetaraan yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis juga turut menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah yang telah membantu proses teknis pelaksanaan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga dokumentasi kegiatan penelitian di lapangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Y., Asri, M., & Febriansa. (2025). Transformation through nonformal education: Implementing Paulo Freire's critical value. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)*, 8(3), 19–26.
- Behan, C. (2014). Learning to escape: Prison education, rehabilitation, and the potential for transformation. *Journal of Prison Education and Reentry*, 1(1), 20–31.
- Bradshaw, J. (1972). A taxonomy of social need. In G. McLachlan (Ed.), *Problems and progress in medical care: Essays on current research* (7th series, pp. 71–82). Oxford University Press.
- Buana, S. R., Toni, & Agustian, R. A. (2025). Pemenuhan hak pendidikan bagi anak sebagai warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(2), 65–80.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Davis, L. M., Steele, J. L., Bozick, R., Williams, M. V., Turner, S., Miles, J. N. V., Saunders, J., & Steinberg, P. S. (2014). *How effective is correctional education, and where do we go from here? The results of a comprehensive evaluation*. RAND Corporation.
- Fathoni, A. R. (2025). Efektivitas program rehabilitasi narapidana dalam kebijakan pemasyarakatan di Indonesia. *Journal of Correctional Management*, 1(2), 10–23.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Hizbullah, A., & Karisadini. (2025). Collaborative governance program PKBM sekolah kesetaraan dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA Payakumbuh. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(4), 5414–5424.
- Kaufman, R. A., Rojas, A. M., & Mayer, H. (1993). *Needs assessment: A user's guide*. Educational Technology Publications..
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Lubis, R. E., & Warih, W. C. (2025). Model evaluasi CSE-UCLA pada program pembinaan kepribadian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(5), 6499–6507.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
-

- Nasrullah, Muchran, & Aderiantika. (2021). Analysis of concept, implementation and impact on training needs assessment for apparents in Pattondon Village, Maiwa District, Enrekang Regency. *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(1), 81–97.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rahmat, A. (2018). *Manajemen pemberdayaan pada pendidikan nonformal*. Ideas Publishing.
- Sudjana, D. (2004). *Pendidikan nonformal: Wawasan, sejarah perkembangan, falsafah, teori pendukung, asas*. Falah Production.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. PT Gramedia.
- Tonseth, C., & Bergsland, R. (2019). Prison education in Norway: The importance for work and life after release. *Cogent Education*, 6(1), 1–13.
- UNESCO. (2022). *The futures of education: Perspectives and insights from the UNESCO Associated Schools Network (ASPnet)*. UNESCO.
- Wahyuni, S., Fahira, N. D., & Sariyanti. (2023). Proses pelaksanaan pembelajaran kesetaraan paket C bagi warga binaan Lapas Kelas IIA dan warga belajar di PKBM Mahakam Jaya Samarinda. *Jurnal Lentera Pendidikan*, 8(2), 217–224.
- Warner, K., & Anne, C. (2014). Prison education across Europe: Policy, practice, politics. *London Review of Education*, 12(2), 17–25.
- Widyaningtyas, M. N., & Subroto, M. (2023). Analisis yuridis terhadap implementasi program pendidikan kesetaraan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Jurnal Intelektua: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 12(2), 22–28.